



RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan.

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketenagakerjaan dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Renja ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 26 Juni 2023

Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Rudi Sakyakirti, SH., MH
NIP.19650606 199303 1 018

Daftar Isi

Daftar Gambar	iv
Daftar Table	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah.....	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	3
1.2 Landasan Hukum	4
1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.....	4
1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran	5
1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA.....	9
DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU	9
2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam	20
2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah.....	20
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan.....	20
2.3.3 Peluang dan Tantangan.....	22

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	33
BAB III	36
TUJUAN DAN SASARAN.....	36
DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM	36
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.....	37
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	39
BAB IV	51
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	51
BAB V.....	60
PENUTUP.....	60

Daftar Gambar

Gambar 1 - Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah.....	3
Gambar 2 - Keterkaitan Renja Dokumen Perencanaan Lainnya.....	4

Daftar Table

Table 1 (2.1) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2023	10
Table 2 (2.2) Pencapaian Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah	19
Table 3 (2.3) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024.....	27
Table 4 (2.4) Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024	33
Table 5 (3.1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	38
Table 6 (3.2) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	43
Table 7 (4.1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renja Perangkat Daerah

Pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Agar pembangunan daerah lebih terarah dan terukur maka diperlukan perencanaan. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah. Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah terdiri atas RPJPD, RPJMD, dan RKPD sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

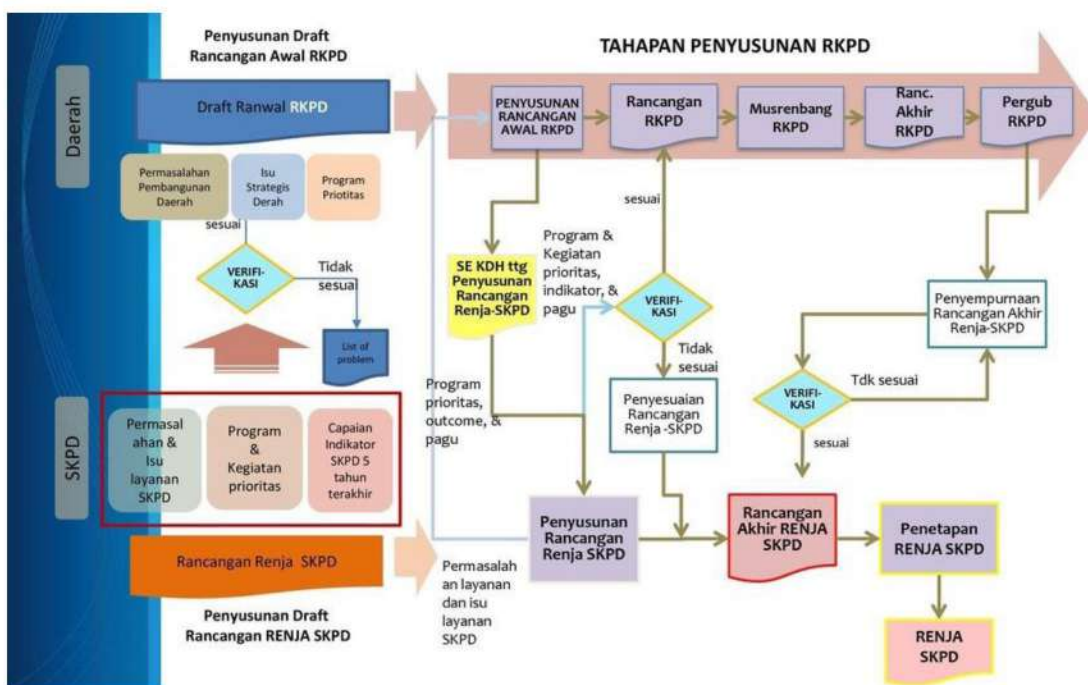
1.1.2 Proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dari persiapan penyusunan Renja, penyusunan Rancangan Renja, pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan Musrenbang penyusunan RKPD, penyusunan Rancangan Akhir Renja dan penetapan Renja. Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

Tahapan penyusunan Renja dapat dilihat pada gambar berikut ini:



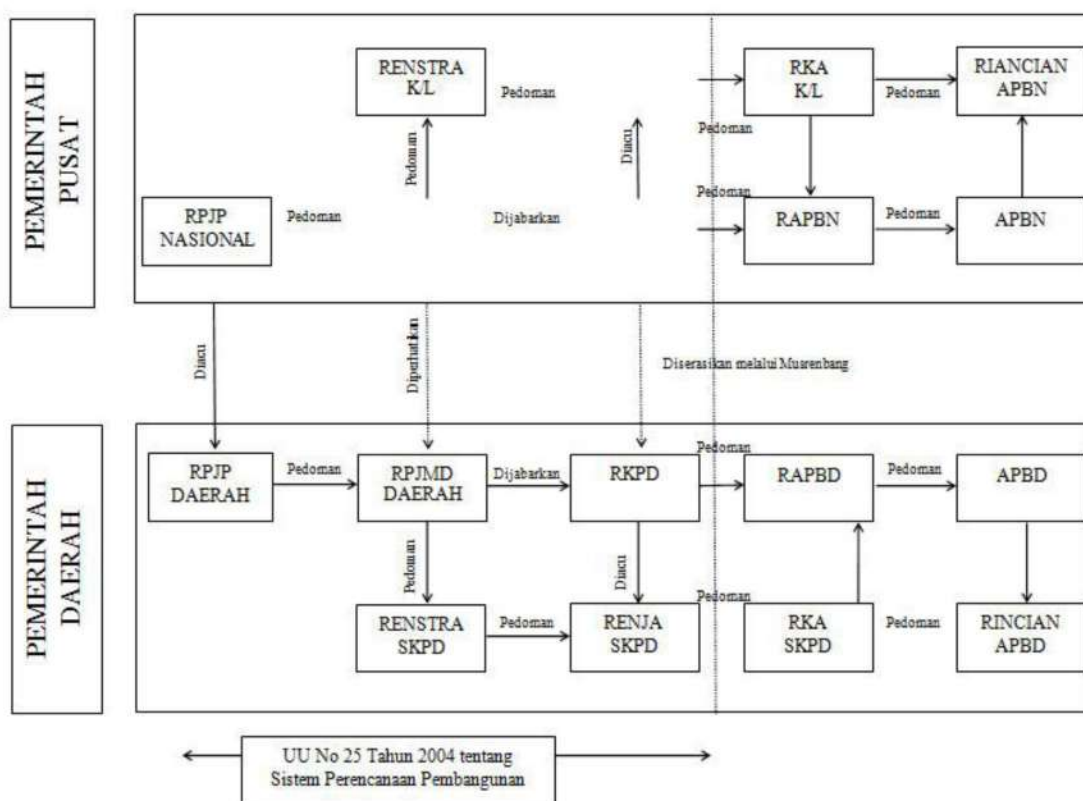
Gambar 1 - Tahapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2 - Keterkaitan Renja Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2 Landasan Hukum

1.2.1 Ketentuan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, dan kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

- c. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- d. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);
- e. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

1.2.2 Ketentuan Tentang Perencanaan dan Penganggaran

Ketentuan Tentang Perencanaan Penganggaran adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025;
- k. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
- l. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021 – 2026;
- n. Peraturan Walikota Batam Nomor 65 Tahun 2023 Tentang RKPD Kota Batam Tahun 2024.

1.2.3 Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja

Ketentuan Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator Lainnya Terkait Dinas Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Maksud dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada RKPD dan selaras dengan dokumen Renstra.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Tujuan dari penyusunan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk menyingkronkan dan menyinergikan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dengan tujuan dan sasaran

pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan daerah (RKPD).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja, keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya; landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja, serta program dan kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

Memuat rencana kerja dan pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

BAB V PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA
DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM TAHUN LALU

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana kerja pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan, sehingga dapat diketahui efektifitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

2.1 Evaluasi Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Untuk memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2023 dan sebagai sarana perbaikan kinerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada masa yang akan datang, maka dapat disampaikan ikhtisar penyelenggaraan program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Laporan ini mengungkapkan keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan.

Sesuai APBD Tahun Anggaran 2023, Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengelola anggaran sebesar Rp. 27.680.001.400,- Belanja Operasi sebesar Rp. 27.421.221.400,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 258.780.000,- Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai digunakan untuk gaji dan tunjangan, sedangkan Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja Tahun 2023 terdapat pada tabel 1 (2.1) berikut :

Table 1 (2.1) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s.d Tahun 2023

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022 (n-2)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2023)	Perkiraan dan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2.07	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
	Bidang Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar									
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%
2.07.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%

		terpenuhi								
2.07.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	3.344 orang	-	686 orang	686 orang	100%	686 orang/bulan	1372 orang	41%
2.07.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	1380 Dokumen	-	276 dokumen	276 dokumen	100%	276 dokumen	552	40%
2.07.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%
2.07.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Paket	-	5 paket	5 paket	100%	5 paket	10 paket	50%
2.07.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	170 Paket	-	45 paket	45 paket	100%	61 paket	106 paket	62.35%
2.07.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	95 Paket	-	12 paket	12 paket	100%	13 paket	25 paket	26.31%
2.07.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	105 Dokumen	-	20 dokumen	20 dokumen	100%	21 dokumen	41 dokumen	39%

		yang disediakan								
2.07.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150 Laporan	-	12 laporan	12 laporan	100%	53 laporan	65 laporan	43.33%
2.07.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%
2.07.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	21 Paket	-	1 paket	1 paket	100%	-	1 paket	4,76%
2.07.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	45 Unit	-	25 unit	25 unit	100%	26 unit	51 unit	113.3%
2.07.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%
2.07.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	240 Laporan	-	48 laporan	48 laporan	100%	72 laporan	120 laporan	50%

2.07.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	715 Laporan	-	13 laporan	13 laporan	100%	156 laporan	169 laporan	23.64%
2.07.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%
2.07.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	-	5 unit	5 unit	100%	5 unit	10 unit	100%
2.07.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	1 Tahun	-	31 unit	31 unit	100%	174 unit	205 unit	23,33%
2.07.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 unit	-	1 unit	1 unit	100%	1 unit	1 unit	46,71%
2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %
2.07.02.0.01	Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Yang Disusun	100 %	-	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %

2.07.02.0.01.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	20 Buku/20 Dokumen	-	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	-	20 Dokumen	100%
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	20.77%	-	15.12%	13.34%	88.22%	16,38%	29.72%	143%
2.07.03.2.01	Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	100%	-	15%	13.12%	100%	15%	28.12%	28.12%
2.07.03.2.01.01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	4081	-	544 orang	544 orang	100%	767 orang	1311 orang	32.12%
2.07.03.2.02	Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	83,33%	-	14%	19%	136%	14%	33%	39.6%
2.07.03.2.02.01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	60 LPK	-	10 LPK	10 LPK	100%	10 Lembaga	20 LPK	33.33%

2.07.03.2.05	Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	2.16%	-	0.38%	0.22%	57.89%	0.38%	0.6%	27.77%
2.07.03.2.05.01	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	6200 orang	-	630 dokumen	630 dokumen	100%	717 dokumen	1347 dokumen	21.72%
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan	54%	-	50%	28.68%	57.36%	51%	79.68%	147.55%
2.07.04.2.01	Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi	100%	-	33%	30%	91%	33%	63%	63%
2.07.04.2.01.04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitas layanan ULD	85 Orang	-	Rasionalisasi		-	10 Orang	10 Orang	11.76%
2.07.04.2.03	Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	50%	-	25%	30%	120%	30%	60%	120%

2.07.04.2.03.02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	10000 perusahaan	-	2000 orang	2000 orang	100%	2000 orang	4000 orang	40%
2.07.04.2.03.03	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	4800 Orang	-	600 orang	1880 orang	313.33 %	-	1880 orang	39.2%
2.07.04.2.04	Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI	100%	-	-	-	-	100%	100%	20%
2.07.04.2.04.02	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	1640 orang	-	Rasionalisasi		-	0 Orang	0 Orang	0 Orang
2.07.04.2.05	Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA	100%	-	22%	20%	90.9%	0%	(kegiatan tidak tersedia di KMDN terbaru)	20%
2.07.04.2.05.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memperkerjakan TKA yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan	100 Perusahaan	-	17 kali	12 kali	70.59%	1 kegiatan	0%	0%

2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	99%	-	97%	97%	100%	97%	97%	97.97%
2.07.05.2.01	Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	40%
2.07.05.2.01.03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	-	10 laporan	10 laporan	100%	10 laporan	20 laporan	200%
2.07.05.2.02	Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial	96%	-	94%	94%	100%	94%	94%	97.92%
2.07.05.2.02.04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	-	10 kali	10 kali	100%	1 Lembaga	1 Lembaga	40%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Untuk melaksanakan urusan wajib Bidang Ketenagakerjaan, dalam Renstra Tahun 2021-2026 Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2023 merencanakan 4 (empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan Tenaga Kerja dan Program Hubungan Industrial.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam tahun 2023 :

Table 2 (2.2) Pencapaian Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n+1	Tahun n-2	Tahun n-1	Tahun n	Tahun n n	Tahun n+1		Tahun n+2
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025		2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi			15.12 %	16.38 %	18.32 %	19.59 %	13.34 %	4.69%	-	18.32 %	19.59 %	20.77%	Ketersediaan alokasi anggaran turut mempengaruhi ketercapaian target kegiatan.
1.1	Jumlah pencari kerja yang dilatih			727 orang	727 orang	727 orang	900 orang	544 orang	189 orang	-	727 orang	900 orang	1000 orang	
1.2	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi			1100 orang	1100 orang	1100 orang	1400 orang	630 orang	169 orang	-	1100 orang	1400 orang	1500 orang	
2	Persentase tenaga kerja yang terserap / ditempatkan			50%	51%	52%	53%	28.68 %	86.9%	-	52%	53%	54%	Perlunya penguatan koordinasi lintas sektoral mengenai penempatan Naker.
3	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan			97%	97%	98%	98%	81.38 %	40%	-	98%	98%	99%	Masih adanya pengusaha yang belum memaksimalkan proses mediasi.
4	Persentase data dan informasi Perencanaan Tenaga Kerja yang disajikan dalam buku			100%	0%	0%	0%	100%	0%	-	0%	0%	0%	RTK Makro disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Urusan Ketenagakerjaan adalah salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam, Penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam mengacu pada tugas dan fungsi organisasi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Tenaga Kerja, maka tugas pokok Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Ketenagakerjaan daerah sesuai dengan kewenangannya.

Sedangkan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam adalah :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenagakerjaan.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang ketenagakerjaan.
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan di bidang ketenagakerjaan.
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.

Keberhasilan pembangunan pada bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pembangunan perekonomian suatu daerah karena tenaga kerja menjadi salah satu faktor penentu yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, tidak terlepas dari dokumen perencanaan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Dalam penyusunan dokumen perencanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, pencapaian Visi dan Misi Kota Batam menjadi salah satu fokus dan tujuan utama yang harus dipenuhi. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Misi III yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, berbudaya, produktif dan berakhlak mulia.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Kendala dan permasalahan ketenagakerjaan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Skill pencari kerja yang lebih rendah tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan.

2. Penyebaran informasi pasar kerja yang belum maksimal, sehingga minimnya kesempatan kerja.
3. Masih banyaknya terjadi pelanggaran Undang-Undang Ketenagakerjaan antara lain seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat berdiri suatu perusahaan, kurang terbinanya hubungan industrial dan perlindungan tenaga kerja di suatu perusahaan yang berdampak kepada timbulnya perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja.
4. Upah sektoral, Undang-Undang/Peraturan yang tidak memberikan ukuran tertentu mengenai upah sektoral dan besaran upah sektoral melalui kesepakatan yang sepenuhnya dilakukan kepada pihak pekerja dengan pengusaha.
5. Pembahasan UMK oleh Dewan Pengupahan dan kemudian diusulkan kepada Gubernur sering menimbulkan gejolak (demo pekerja) sehingga dapat mengganggu investasi.
6. Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga mediator.
7. Belum tersedianya Balai Latihan Kerja.
8. Banyak angkatan kerja dari luar Batam yang akhirnya menimbulkan tingginya angka pengangguran di Kota Batam.
9. Belum adanya pendampingan terhadap wirausaha baru
10. Belum optimalnya koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral dalam menangani masalah lowongan dan penempatan tenaga kerja.

Untuk menanggulangi kendala dan masalah tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja dan peningkatan kemampuan bagi tenaga kerja yang sudah bekerja sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri dalam negeri khususnya Kota Batam.
2. Memberikan informasi kerja melalui Bursa Kerja dan melakukan kerjasama dengan perusahaan.
3. Melakukan pembinaan secara berkelanjutan baik klasikal maupun kunjungan ke Perusahaan.
4. Melakukan kajian tentang sektor unggulan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dan membuat kesepakatan antara asosiasi perusahaan dengan serikat pekerja pada sektor yang bersangkutan.
5. Menetapkan struktur dan skala upah pekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yakni PP nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

6. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikut sertakan aparatur pada diklat mediator dan bimbingan teknis lainnya diluar daerah.
7. Melakukan pembangunan Balai Latihan Kerja.
8. Mengalihkan pembangunan industri ke daerah lain hingga kesempatan kerja tidak hanya bisa didapat di Kota Batam.
9. Menyediakan pendampingan bagi wirausaha baru yang telah dibentuk supaya dapat berkembang dan berfungsi sebagai penyedia/membuka lapangan pekerjaan.
10. Meningkatkan koordinasi dengan pimpinan kawasan industri lintas sektoral dalam menangani masalah lowongan dan penempatan tenaga kerja sesuai dengan Permenaker Nomor 39 tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Isu Sumber Daya Manusia (SDM) dan ketenagakerjaan menjadi isu utama di era automasi dan ekonomi digital yang saat ini tengah berkembang dengan cepat. Baik peluang dan tantangan SDM dan ketenagakerjaan harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan Indonesia di era automasi dan ekonomi digital saat ini. Dengan melihat beberapa peluang sebagai berikut:

a. Booming Ekonomi Digital dan Automasi

Pemanfaatan teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif. Selanjutnya, dinamika ekonomi terkini juga direfleksikan dengan hadirnya era automasi. Era automasi yang diperkirakan akan melahirkan revolusi industri 4.0 ini berdiri di atas tren bergesernya perekonomian dari resources-based (berbasis sumber daya) menjadi knowledge-based economy (ekonomi berbasis ilmu pengetahuan). Pergeseran terjadi seiring dengan kesadaran bahwa sumber daya alam memiliki keterbatasan sementara itu disisi lain kekayaan intelektual jika dikelola dengan optimal akan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi yang tidak ada batasnya. Orang-orang di negara maju mencemaskan dampak teknologi terhadap pekerjaan.

Pekerjaan yang rutin memiliki kemungkinan tinggi untuk digantikan oleh mesin. Tetapi, teknologi di saat yang bersamaan juga menyediakan peluang terciptanya pekerjaan baru, meningkatnya produktivitas, dan mengantarkan pelayanan publik yang efektif.

b. Angkatan Kerja Muda (Bonus Demografi)

Peluang pembangunan Ketenagakerjaan berikutnya adalah peningkatan penduduk usia kerja yang merupakan modal besar untuk pertumbuhan ekonomi. Karena itu, pemerintah harus memperhatikan kondisi kependudukan ini sebagai kesempatan untuk mempersiapkan para calon pekerja dan anak-anak yang akan masuk pasar kerja agar mereka menjadi sumber daya yang berkualitas tinggi, memiliki keterampilan dan kompetensi untuk menghadapi persaingan global tenaga kerja baik di tingkat ASEAN (MEA) atau di dunia.

c. Perubahan Kebutuhan Keterampilan dan Model Pembelajaran.

Sebagai konsekuensi dari tren automasi dan tuntutan untuk berinovasi, dibutuhkan tenaga kerja yang memiliki spesialisasi dan keahlian yang mendalam. Di sisi lain, teknologi juga mendorong bertambahnya jenis dan jumlah pekerjaan yang sama kondisinya yaitu menuntut spesialisasi dan keahlian baru. Kebijakan ketenagakerjaan atau lebih luasnya kebijakan terkait dengan SDM harus dapat menjawab tantangan tersebut. Institusi pendidikan juga harus mulai mengubah arah orientasi kurikulum yang mampu mengimbangi dinamika tersebut. Peningkatan keahlian digital perlu diterapkan pada berbagai institusi pendidikan menengah dan Pemerintah harus memikirkan mekanisme pembiayaan yang layak. Pekerja lebih cenderung terlibat dalam pembelajaran orang dewasa (adult learning) ketika ada jaminan akan kelangsungan pendapatan dan penerimaan kembali di pasar tenaga kerja. Mengingat pentingnya training yang dilakukan di tempat kerja, perusahaan perlu berkontribusi terhadap pembiayaannya. Dalam kasus dimana perusahaan menjalankan sendiri program training-nya, mereka bisa bekerja bersama dengan organisasi pekerja untuk mendesain kerangka yang relevan. Organisasi pekerja / buruh memiliki peran utama dalam ekosistem ini.

d. Potensi Pariwisata

Di tengah kelesuan ekonomi global yang diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa tahun mendatang, sebenarnya masih terbuka peluang bagi Indonesia khususnya di Kota Batam yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia untuk dapat meningkatkan kualitas perekonomiannya.

Optimisme ini salah satunya muncul dari perkembangan positif yang terjadi di sektor pariwisata Indonesia.

Terlepas dari berbagai kendala yang masih menghimpit, sektor pariwisata menjadi sektor yang semakin dapat diandalkan dalam upaya

menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah produk, serta menjadi salah satu sumber penerimaan devisa. Dukungan dan strategi kebijakan yang tepat dari pemerintah dalam mengembangkan sektor ini ke depan akan menjadi salah satu kunci utama keberhasilan memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi, terutama terhadap penciptaan lapangan kerja dan peningkatan nilai tambah. Perkembangan sektor perjalanan dan pariwisata semakin menggembirakan sejalan pemulihan ekonomi global dari krisis. Pertumbuhan sektor ini pun diperkirakan akan mengikuti bahkan akan menyamai sektor-sektor utama perekonomian dunia seperti sektor jasa keuangan maupun transportasi dan manufaktur. Keberadaan sektor pariwisata secara langsung dapat menggerakkan bisnis akomodasi, transportasi, hiburan, dan pertunjukan. Pariwisata juga membantu perkembangan industri jasa penginapan, jasa makanan dan minuman, perdagangan eceran, jasa transportasi, industri budaya, olahraga, dan jasa rekreasi.

Adapun tantangan yang harus dihadapi dengan memandang kondisi terkini ketenagakerjaan di Kota Batam di era automasi dan ekonomi digital saat ini :

a. Kualitas Angkatan Kerja

Kualifikasi tenaga kerja secara agregat yang masih rendah tentu menjadi tantangan utama bagi Dinas Tenaga Kerja dalam mengejar produktivitas industri dan juga untuk menghadapi era automasi dan revolusi industri 4.0. Transformasi ke arah automasi, ekonomi digital, dan revolusi industri 4.0 membutuhkan keseriusan dalam peningkatan kualitas SDM. Tantangan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya angkatan kerja sangat berhubungan dengan bagaimana negara berinvestasi pada sumber daya manusianya. SDM menjadi kunci untuk dapat bersaing dalam masa depan perekonomian.

b. Tantangan Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja dengan mendorong industri manufaktur tampak mengalami perbaikan. Industri manufaktur sebagai sektor yang berpotensi besar dalam menciptakan kesempatan kerja yang baik (decent job) harus diakselerasi. Terutama meningkatkan high-skilled labour. Untuk meningkatkan nilai tambah produksi yang berdampak pada diperluasnya kesempatan kerja, industri akselerasi kompetensi pekerja di sektor industri perlu dilakukan.

c. Tantangan Hubungan Industrial

Era digital dan automasi telah mengubah cara bisnis dan industri beroperasi, mengelola, serta mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki. Minim nya jumlah mediator dalam menangani perselisihan menjadi

tantangan kedepan untuk mengkader dan memberikan diklat kepada calon mediator .

d. Peningkatan Keahlian dan Produktivitas Tenaga Kerja

Untuk menjawab tantangan keterampilan dan keahlian SDM tersebut, salah satu solusinya adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja selain dengan memberikan pelatihan kerja juga menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) yang bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan teknis berproduksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja dan bagi komunitas masyarakat sekitarnya. Dengan begitu diharapkan setelah mendapat bekal keterampilan berproduksi atau keahlian tertentu tersebut masyarakat dapat berwirausaha atau mencari kerja.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rancangan Teknokratik Tahun 2021-2024 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- e. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;
- f. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- g. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- h. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD;
- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan rentan;
- j. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan ketahanan iklim.

Dari beberapa isu strategis Kota Batam tersebut, yang relevan dan penting bagi Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam penyelenggaraan layanan dasar bidang ketenagakerjaan adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19

Merebaknya pandemi Covid-19 beserta penanganannya menimbulkan protokol kesehatan baru yang perlu dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat serta menimbulkan kebiasaan-kebiasaan baru yang sering disebut dengan normal baru. Era dimana kebiasaan-kebiasaan baru tersebut menjadi normal disebut dengan era normal baru. Pada era tersebut, kebiasaan baru tidak hanya timbul pada aktivitas masyarakat sehari-hari termasuk dalam sektor bisnis dan pemerintahan. Normal baru akan mendorong berubahnya cara berkomunikasi, interaksi, dan menjalankan bisnis bagi sebagian besar masyarakat.

- b. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
Peningkatan daya saing tenaga kerja dan iklim hubungan industrial yang kondusif perlu menjadi isu strategis. Masalah daya saing tenaga kerja yang rendah ini berkaitan dengan kualitas SDM yang rendah, tidak semua tenaga kerja lulusan pendidikan yang lebih tinggi memiliki kesiapan dan kapasitas sesuai kebutuhan dunia kerja. Menghadapi pasar kerja yang fleksibel ini salah satu hal yang dapat dilakukan adalah peningkatan keahlian dan produktivitas tenaga kerja.
- c. Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Program/kegiatan Tenaga Kerja Kota Batam perlu dilakukan sinkronisasi dengan Ranwal RKPD sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan definitif untuk diajukan menjadi rencana kerja.

Berikut adalah table 3 (2.3) review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 sebagai berikut:

Table 3 (2.3) Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	Catatan Analisis
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Batam		100%	10.580.883.162	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Batam		100%	14.525.519.479	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				8.784.525.557	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.882.456.514	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ bulan	8.703.165.557	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/ bulan	9.801.096.514	Perubahan Gaji dari THL ke PPPK
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.360.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	81.360.000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				475.513.526	Administrasi Umum Perangkat Daerah				852.003.526	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.627.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.627.000	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	115.546.965	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	194.146.965	Perpindahan kantor kegedung baru
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	198.629.561	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	198.629.561	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	152.110.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	450.000.000	Melakukan studi tiru terkait pelayanan disabilitas
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			238.636.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			238.636.100	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	238.636.100	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	21 Unit	238.636.100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			767.357.979	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			635.006.619	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	254.961.600	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	254.961.600	

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	512.396.379	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	13 Laporan	380.045.019	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			314.850.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			2.917.416.720	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	178.510.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit	178.510.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit	36.340.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	137.260.000	Perpindahan kantor kegedung baru
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	2.601.646.720	Rehabilitasi gedung karna rusak berat
II	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Batam	18,32%	18.405.529.059	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Kota Batam	18,32%	18.405.529.059	
5	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			8.347.622.397	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			8.347.622.397	
	Proses Pelaksanaan	Jumlah Tenaga	727	8.347.622.397	Proses Pelaksanaan	Jumlah Tenaga Kerja	727	8.347.622.397	

	Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang		
6	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			432.150.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			432.150.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	432.150.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	10 Lembaga	432.150.000	
7	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9.625.756.662	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			9.625.756.662	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1100 Dokumen	9.625.756.662	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1100 Dokumen	9.625.756.662	
III	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Batam	52%	509.737.221	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Kota Batam	52%	758.713.800	
8	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			99.279.221	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			150.000.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 Orang	99.279.221	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 Orang	150.000.000	
9	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			221.908.000	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			420.163.800	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang	1200 Orang	121.908.000	Pelayanan dan Penyediaan	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang	1200 Orang	121.908.000	

	Pasar Kerja Online		Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			Informasi Pasar Kerja Online		Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)			
	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 Orang	100.000.000	Job Fair/Bursa Kerja		Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 Orang	298.255.800	Untuk memperluas kesempatan kerja
10	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				188.550.000	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				188.550.000	
	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	300 Orang	188.550.000	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran		Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	300 Orang	188.550.000	
11	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0	Perubahan pada nomenklatur sesuai KMDN terbaru
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	0	0	
IV	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Batam		98%	151.268.810	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Kota Batam		98%	291.836.988	
12	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1				69.431.822	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi				210.000.000	

	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota				dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	69.431.822	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	10 Laporan	210.000.000	Studi tiru terkait pengupahan
13	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			81.836.988	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			81.836.988	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	81.836.988	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1 Lembaga	81.836.988	
T O T A L				29.647.418.252	T O T A L				33.981.599.326

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Salah satu tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Masyarakat dapat menyampaikan usulan program dan kegiatan kepada pemerintah melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) maupun secara langsung kepada Perangkat Daerah terkait.

Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja Kota Batam akan memperhatikan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat baik melalui Musrenbang maupun yang disampaikan langsung kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.

Table 4 (2.4) Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2024

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	Pelatihan Operator Komputer	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan
2	Pelatihan Welder	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
3	Pelatihan Garmen	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
4	Pelatihan Pencaker	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
5	Pelatihan Wiring Harness	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
6	Pelatihan Rigger	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
7	Pelatihan Welder	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	14	Pokir Dewan
8	Pelatihan Scaffolding	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
9	Pelatihan Menjahit Garmen (Asisten Operator)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
10	Pelatihan Menjahit Garmen (Operator Senior)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
11	Pelatihan Menjahit Garmen (Operator Junior)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan
12	Pelatihan Tata Boga Kue Nasional	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	40	Pokir Dewan
13	Pelatihan Tata Boga Pastry	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan

14	Pelatihan Menjahit Baju Mode	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
15	Pelatihan Menjahit Pembuat Pakain Level 1	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
16	Pelatihan Fitter Pipe	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
17	Pelatihan Wiring Herness	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan
18	Pelatihan Bahasa Jepang untuk Persiapan Praseleksi User untuk kerja ke Jepang	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	8	Pokir Dewan
19	Pelatihan Weder	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
20	Pelatihan Fitter Pipe	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	19	Pokir Dewan
21	Pelatihan Menjahit Pola Tingkat Dasar	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	30	Pokir Dewan
22	Pelatihan Menjahit	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	50	Pokir Dewan
23	Pelatihan Bahasa Jerman	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan
24	Pelatihan Bahasa Korea	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
25	Pelatihan Welder 3G/4G	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
26	Pelatihan Bahasa Inggris	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	10	Pokir Dewan
27	Pelatihan Tata Boga	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	25	Pokir Dewan
28	Pelatihan Publik Speaking (Humas Digital- Konten Kreator, sosial media, Leadership)	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	-	Belum tersedia di SSH
29	Pelatihan Bahasa Inggris	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
30	Pelatihan Menjahit Pola Tingkat Dasar	Batam	Jumlah pencari kerja yang dilatih	20	Pokir Dewan
31	Bimtek dan Sertifikasi Human Capital Supervisor Industri Level 4	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
32	Bimtek dan Sertifikasi Capital Division I Level 5	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	16	Pokir Dewan
33	Bimtek dan Sertifikasi Instruktur Level 5	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	18	Pokir Dewan
34	Bimtek dan Sertifikasi Barista	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
35	Bimtek dan Sertifikasi Security Pratama	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	10	Pokir Dewan

36	Bimtek dan Sertifikasi Kewirausahaan	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
37	Bimtek dan Sertifikasi Pemandu Wisata	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan
38	Bimtek dan Sertifikasi K3 Migas Madya	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	19	Pokir Dewan
39	Bimtek dan Sertifikasi K3 Migas Operator	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	19	Pokir Dewan
40	Bimtek dan Sertifikasi Welder	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	180	Pokir Dewan
41	Bimtek dan Sertifikasi NDT PT	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	12	Pokir Dewan
42	Bimtek dan Sertifikasi NDT MT	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	16	Pokir Dewan
43	Bimtek dan Sertifikasi K3 Madya	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	25	Pokir Dewan
44	Bimtek dan Sertifikasi Hubungan Industrial Jenjang 4	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	25	Pokir Dewan
45	Bimtek dan Sertifikasi Produktivitas Jenjang 4	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	22	Pokir Dewan
46	Bimtek dan Sertifikasi Transportasi Wisata Taxi Driver	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	30	Pokir Dewan
47	Bimtek Jurnalistik	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	25	Pokir Dewan
48	Bimtek dan Sertifikasi Ahli K3 Madya	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	19	Pokir Dewan
49	Bimtek dan Sertifikasi K3 Pengawas Scaffolding	Batam	Jumlah tenaga kerja yang disertifikasi	20	Pokir Dewan

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN
DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, visi pembangunan nasional adalah "**Indonesia yang mandiri, adil dan makmur**".

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi, yaitu:

- 1) Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
- 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing;
- 3) Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
- 4) Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu;
- 5) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
- 6) Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
- 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
- 8) Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Strategi untuk melaksanakan Visi dan Misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam periode lima tahunan atau RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional). Masing-masing tahap mempunyai skala prioritas dan strategi pembangunan yang merupakan kesinambungan dari skala prioritas dan strategi pembangunan pada periode-periode sebelumnya.

Tahapan skala prioritas utama dan strategi RPJMN secara ringkas adalah sebagai berikut:

- 1) RPJMN ke-1 (2005–2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakan Indonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat.
- 2) RPJMN ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.
- 3) RPJMN ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan

menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

- 4) RPJMN ke-4 (2020–2024) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

Oleh karena itu, tema RPJM 2020-2024 adalah "Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan" yang dituangkan ke dalam 7 misi atau agenda pembangunan. Ketujuh agenda pembangunan RPJMN IV tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing;
4. Membangun Kebudayaan Dan Karakter Bangsa;
5. Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan Dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Terdapat 5 (lima) misi Kota Batam Tahun 2021 – 2026 dimana yang terkait dengan Ketenagakerjaan adalah Misi ke – 3 yaitu :

Mewujudkan SDM yang Berdaya Saing, Berbudaya, Produktif dan Berakhlak Mulia, dengan tujuan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul dan bertakwa menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, dengan sasaran yaitu *Menurunnya masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran*. Hal ini sejalan dengan sasaran yang ingin dicapai dalam mendukung tujuan jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kota Batam yang bisa dilihat pada Tabel 5 (3.1) berikut:

Table 5 (3.1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan penyerapan tenaga kerja di Kota Batam		Tingkat Pengangguran Terbuka	11,64 %	10,00 %	9,75 %	9,65 %	9,60 %	9,55 %
		Menurunkan masalah ketenagakerjaan dan berkurangnya jumlah pengangguran	Persentase Penurunan jumlah pengangguran	11,64 %	10%	9%	8%	7%	6%
			Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan	96%	97%	97%	98%	98%	99%

Dalam mencapai tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 tersebut, dibutuhkan upaya-upaya yang bersifat komprehensif berupa upaya kebijakan, strategis dan program pembangunan ketenagakerjaan dengan melihat kepada isu-isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan yaitu :

1. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM melalui kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan di Kota Batam.
2. Mewujudkan perluasan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
3. Meningkatkan kualitas perangkat hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha.
4. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.
5. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu

mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Melihat dari isu-isu strategis Pembangunan Ketenagakerjaan seperti yang telah diuraikan diatas, didapatlah kebijakan pemecahan masalah ketenagakerjaan berdasarkan skala prioritas yang dituang dalam program, kegiatan dan subkegiatan. Strategi pemecahan permasalahan masalah ketenagakerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Peningkatan efektifitas peran perencanaan tenaga kerja yang merupakan guidance dalam pemecahan berbagai permasalahan ketenagakerjaan di masa yang akan datang sehingga mampu mengarahkan pembangunan ketenagakerjaan kepada tujuan utama pembangunan ketenagakerjaan dan agenda SDGs.
2. Memberdayakan dan mendayagunakan angkatan kerja secara optimal dan manusiawi.
3. Mewujudkan kesempatan kerja yang menggambarkan ketersediaan kesempatan kerja dalam jumlah dan kualitas yang memadai/layak bagi seluruh angkatan kerja.
4. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas kerja, disiplin, sikap dan etos kerja kepada seluruh angkatan kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan yang dibutuhkan oleh pembangunan daerah.
5. Produktivitas tenaga kerja yang menggambarkan tenaga kerja daerah dalam menghasilkan barang dan jasa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi.
6. Efektifitas hubungan industrial dalam mewujudkan ketenangan bekerja dan ketenangan berusaha (*industrial peace*) sehingga dapat mendorong produktifitas tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja.

7. Mewujudkan kesejahteraan para buruh/pekerja/karyawan dan keluarganya melalui sistem pengupahan yang berkeadilan dan layak.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan pada tahun 2024 tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota

- 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
- 2) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- 3) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- 4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor;
- 5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
 - 2) Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - 3) Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja
- 1) Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - 2) Kegiatan Pengelolaan Informasi Kerja
 - Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online
 - Job Fair/ Bursa Kerja
 - 3) Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
 - 4) Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- d. Program Hubungan Industrial
- 1) Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - 2) Kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota

Dalam Rumusan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah dibandingkan dengan Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 yang bisa dilihat pada Tabel 3 (2.3) dan Tabel 7 (4.1) berikut terdapat perbedaan pagu yang cukup signifikan, dimana hal ini disebabkan beberapa keadaan sebagai berikut:

- Penambahan ASN (Pegawai PPPK)
- Penambahan aset karena perpindahan kantor ke gedung baru
- Rehabilitasi gedung kantor karena rusak berat
- Penambahan dari masing-masing bidang untuk perjalanan dinas keluar daerah
- Penambahan pagu kegiatan job fair untuk memperluas kesempatan kerja
- Perubahan nomenklatur sesuai KMDN terbaru
- Penambahan pagu honor pendamping disabilitas

Rencana Program dan Kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 adalah berikut :

Table 6 (3.2) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	Batam	100%	14.525.525.688		100%	11.752.745.908
X	XX	1	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	9.882.461.935		100%	9.157.374.158
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51 Orang/Bulan	9.801.101.935		49 Orang/Bulan	9.076.014.158
X	XX	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	81.360.000		12 Dokumen	81.360.000
X	XX	1	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		0	0		100%	363.982.381

X	XX	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-		3 Paket	363.982.381
X	XX	1	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	852.003.000		100%	589.157.715
X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.627.000		4 Paket	5.627.000
X	XX	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	273.122.000		34 Paket	115.546.965
X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	119.885.000		19 Paket	312.273.750
X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000		21 Dokumen	3.600.000
X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	449.769.000		30 Laporan	152.110.000

X	XX	1	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	249.486.000		100%	238.636.100
X	XX	1	207	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		24 Unit	249.486.000		9 Unit	238.636.100
X	XX	1	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	597.275.184		100%	767.357.979
X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	254.961.600		48 Laporan	254.961.600
X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	342.313.584		143 Laporan	512.396.379
X	XX	1	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik		100%	2.944.299.569		100%	636.237.575
X	XX	1	209	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang		5 Unit	178.510.000		5 Unit	178.510.000

					Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	dipelihara dan dibayarkan pajaknya						
X	XX	1	209	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	137.260.000		55 Unit	36.340.000	
X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	2.628.529.569		1 Unit	421.387.575	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,32%	18.405.523.638		19,59%	19.084.693.082	
2	7	3	201		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	18%	8.347.621.958		22%	8.597.622.397	
2	7	3	201	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	815 Orang	8.347.621.958		900 orang	8.347.622.397	
2	7	3	201	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan	30 Lembaga	0		30 Lembaga	250.000.000	

					Pelatihan Kerja	Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n						
2	7	3	202		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	16,67%	432,150,000		16,67%	620.668.895	
2	7	3	202	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	10 Lembaga	432,150,000		10 Lembaga	620.668.895	
2	7	3	204		Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mengikuti program konsultasi	20%	0		20%	250.000.000	
2	7	3	204	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 perusahaan kecil	0		100 Perusahaan	250.000.000	
2	7	3	205		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	0,38%	9.625.751.680		0,49%	9.616.401.790	
2	7	3	205	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	821 Dokumen	9.625.751.680		1400 Dokumen	9.616.401.790	
2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	52%	758.713.500		53%	528.546.524	

					/ditempatkan						
2	7	4	201		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi	11,79%	150.000.000		29,41%	118.088.524
2	7	4	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	10 Orang	150.000.000		25 orang	118.088.524
2	7	4	203		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja	45%	420.163.500		50%	221.908.000
2	7	4	203	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1200 Orang	121.908.000		2000 perusahaan	121.908.000
2	7	4	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja	800 Orang	298.255.500		1200 Orang	100.000.000

2	7	4	204		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI		18,29%	188.550.000		21,95%	103.685.000
2	7	4	204	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani		100 orang	188.550.000		360 orang	103.685.000
2	7	4	205		Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA		20%	0		20%	84.865.000
2	7	4	205	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memperkerjakan TKA yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan		0	0		100 Perusahaan	84.865.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan		98%	291.836.500		98%	156.850.629
2	7	5	201		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	210.000.000		100%	79.749.289

2	7	5	201	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		10 Laporan	210.000.000		10 Laporan	79.749.289
2	7	5	202		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial		98%	81.836.500		98%	77.101.340
2	7	5	202	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	81.836.500		1 Lembaga	77.101.340
								Total	33.981.599.326		Total	31.522.836.143

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025 dengan tetap memperhatikan Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Merumuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam pada Tahun 2024 tetap merujuk pada target RPJMD Kota Batam Tahun 2024, Pagu Indikatif, lokasi kegiatan, serta SDM dan sarana penunjang lainnya yang dapat menentukan keberhasilan suatu program dan kegiatan.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan guna menunjang ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 ini, maka disusun beberapa Program dan Kegiatan terkait penyelenggaraan kesejahteraan pekerja di Kota Batam oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam. Ada 4 Program, 14 kegiatan dan 21 Sub Kegiatan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 dengan Rencana Anggaran sebesar Rp. 33.981.599.326,- yang digunakan untuk Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Non-Urusan dan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar sebagaimana tabel 7 (4.1) dibawah ini :

Table 7 (4.1) Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Perkiraan Maju Tahun 2025

Dinas Tenaga Kerja Kota Batam

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
X	XX	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota	Batam	100%	14.525.525.688		100%	11.752.745.908
X	XX	1	202		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang terpenuhi		100%	9.882.461.935		100%	9.157.374.158
X	XX	1	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		51 Orang/Bulan	9.801.101.935		49 Orang/Bulan	9.076.014.158
X	XX	1	202	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	81.360.000		12 Dokumen	81.360.000
X	XX	1	205		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase rata-rata layanan administrasi kepegawaian yang difasilitasi		0	0		100%	363.982.381

X	XX	1	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	-		3 Paket	363.982.381
X	XX	1	206		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	852.003.000		100%	589.157.715
X	XX	1	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.627.000		4 Paket	5.627.000
X	XX	1	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	273.122.000		34 Paket	115.546.965
X	XX	1	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	119.885.000		19 Paket	312.273.750
X	XX	1	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3.600.000		21 Dokumen	3.600.000
X	XX	1	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	449.769.000		30 Laporan	152.110.000

X	XX	1	207		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100%	249.486.000		100%	238.636.100
X	XX	1	207	6	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		24 Unit	249.486.000		9 Unit	238.636.100
X	XX	1	208		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		100%	597.275.184		100%	767.357.979
X	XX	1	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	254.961.600		48 Laporan	254.961.600
X	XX	1	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		13 Laporan	342.313.584		143 Laporan	512.396.379
X	XX	1	209		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dalam kondisi baik		100%	2.944.299.569		100%	636.237.575
X	XX	1	209	1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas		5 Unit	178.510.000		5 Unit	178.510.000

					Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan	Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya						
X	XX	1	209	6	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	102 Unit	137.260.000		55 Unit	36.340.000	
X	XX	1	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	2.628.529.569		1 Unit	421.387.575	
2	7	3			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	18,32%	18.405.523.638		19,59%	19.084.693.082	
2	7	3	201		Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan	18%	8.347.621.958		22%	8.597.622.397	
2	7	3	201	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	815 Orang	8.347.621.958		900 orang	8.347.622.397	
2	7	3	201	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan	Jumlah Kesepakatan/ Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur	30 Lembaga	0		30 Lembaga	250.000.000	

					Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n					
2	7	3	202		Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase LPK yang terakreditasi	16,67%	432,150,000		16,67%	620.668.895
2	7	3	202	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	10 Lembaga	432,150,000		10 Lembaga	620.668.895
2	7	3	204		Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Persentase perusahaan kecil yang mengikuti program konsultasi	20%	0		20%	250.000.000
2	7	3	204	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	100 perusahaan kecil	0		100 Perusahaan	250.000.000
2	7	3	205		Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yang disertifikasi	0,38%	9.625.751.680		0,49%	9.616.401.790
2	7	3	205	1	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	821 Dokumen	9.625.751.680		1400 Dokumen	9.616.401.790

2	7	4			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap /ditempatkan		52%	758.713.500		53%	528.546.524
2	7	4	201		Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tenaga Kerja mendapatkan layanan AKAD dan AKL, Penyuluhan, Pemberdayaan dan Tenaga Kerja disabilitas yang diberikan konsultasi		11,79%	150.000.000		29,41%	118.088.524
2	7	4	201	4	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		10 Orang	150.000.000		25 orang	118.088.524
2	7	4	203		Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase informasi lowongan kerja yang ditindaklanjuti pencari kerja		45%	420.163.500		50%	221.908.000
2	7	4	203	2	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)		1200 Orang	121.908.000		2000 perusahaan	121.908.000
2	7	4	203	3	Job Fair/ Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui Job Fair/Bursa Kerja		800 Orang	298.255.500		1200 Orang	100.000.000

2	7	4	204		Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan penyebarluasan informasi perlindungan CPMI dan PMI		18,29%	188.550.000		21,95%	103.685.000
2	7	4	204	2	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani		100 orang	188.550.000		360 orang	103.685.000
2	7	4	205		Kegiatan Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang mendapat sosialisasi peraturan bagi TKA		20%	0		20%	84.865.000
2	7	4	205	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perusahaan yang memperkerjakan TKA yang mengikuti sosialisasi peraturan ketenagakerjaan		0	0		100 Perusahaan	84.865.000
2	7	5			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase penyelesaian masalah ketenagakerjaan		98%	291.836.500		98%	156.850.629
2	7	5	201		Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peraturan perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja bersama yang didaftarkan		100%	210.000.000		100%	79.749.289

2	7	5	201	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan		10 Laporan	210.000.000		10 Laporan	79.749.289
2	7	5	202		Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial		98%	81.836.500		98%	77.101.340
2	7	5	202	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1 Lembaga	81.836.500		1 Lembaga	77.101.340
								Total	33.981.599.326		Total	31.522.836.143

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya akan dijadikan acuan dan pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Tenaga Kerja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang Ketenagekerjaan sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan keefektifan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024 maka ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Substansi Renja Dinas Tenaga Kerja Kota Batam disusun terukur berdasarkan tatalaksana arah kebijakan dalam RKPD Kota Batam Tahun 2024 dan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2021-2026.
2. Tindak lanjut alokasi anggaran dan pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Renja Tahun 2024 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian indikator kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.
3. Dari review rancangan awal RKPD terhadap Rancangan akhir RKPD terdapat perubahan pagu anggaran yang cukup signifikan pada sub kegiatan pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya dimana hal ini sebagai upaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, mengingat bahwa gedung, halaman parkir dan pagar Kantor Dinas Tenaga Kerja sudah rusak berat dan tidak layak lagi dipergunakan sebagai gedung pemerintah.
4. Guna mendukung tercapainya target program dan kegiatan dibutuhkan anggaran yang memadai dan regulasi yang mendukung pelaksanaan wewenang dan tugas, maka diperlukan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Daerah Kota Batam nomor 2 tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) berupa Peraturan Walikota Batam sebagai dasar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pegawai dinas tenaga kerja agar semua terget dalam dokumen pelaksanaan anggaran dapat terpenuhi dengan maksimal.

Demikian Rancangan Renja Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA dan DPA Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2024.

Batam, 26 Juni 2023
Kepala Dinas Tenaga Kerja
Kota Batam



Rudi Sakyakirti, SH., MH
NIP.19650606 199303 1 018